

Analisis Tingkat Kesehatan BUMN dari Aspek keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 (Studi Kasus pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Periode 2019-2023)

Annisa Adinda Putri ^{1*}

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Indonesia

*Email: annisaadindaputri12@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the health level of PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. and trends in its financial health during the 2019-2023 period. The financial aspect, as per the Decree of the Minister of BUMN Number: KEP-100/MBU/200, is assessed using indicators such as Return on Investment (ROI), Return to Shareholders (ROE), Current Ratio, Cash Ratio, Total Asset Turnover, Inventory Turnover, Collection Periods, and Capital to Total Asset Ratio. The assessment results show that PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. maintained a healthy financial health during the 2019-2023 period, consistently receiving the HEALTHY predicate in the AA category with a value interval of $80 < TS \leq 95$. The trend, despite a slight decline in 2020 due to a decrease in the TATO ratio, showed a positive trajectory, rising again in 2021 and remaining stable until 2023 with a total score of 87.14.

Keywords: BUMN, Financial performance, ROA, ROE, BUMN Health Level

PENDAHULUAN

Sebagai suatu perusahaan yang dimiliki oleh negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan layanan publik, serta memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, yaitu pemerintah Indonesia. Kehadiran BUMN didasarkan pada tujuan untuk menjamin bahwa sektor-sektor vital yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dikelola dengan efektif dan efisien, dengan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan bisnis semata. Sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional, BUMN terus beradaptasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan beroperasi di berbagai sektor seperti energi, transportasi, telekomunikasi, perbankan, dan infrastruktur, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan dan produk esensial bagi masyarakat. Selain itu, BUMN juga berperan signifikan sebagai penyumbang utama pendapatan negara melalui berbagai kontribusi finansial, seperti dividen dan pajak.

Pada tahun 2023, kontribusi BUMN kepada negara yang berasal dari pajak, dividen serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai 21,9%. Selain itu, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), beberapa BUMN telah menjadi penyumbang devisa negara di tahun 2023 seperti PT Pertamina yang berhasil menyumbang devisa negara sebesar Rp199,7 triliun yang berasal dari penjualan gas bumi, minyak mentah, dan produk turunan lainnya. Kemudian ada PT Telkom Indonesia yang menyumbang devisa negara sebesar Rp106,7 triliun yang berasal dari penjualan jasa telekomunikasi dan aktif melakukan ekspansi hingga keluar negeri, seperti Vietnam, Filipina, dan Timor Leste. Dari sektor perbankan ada PT Bank Mandiri yang berhasil menyumbang devisa negara sebesar 63,1 triliun.

Namun dibalik prestasi tersebut, dalam lima tahun terakhir kondisi BUMN di Indonesia menjadi fokus penting seiring dengan perubahan ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta tantangan internal yang dihadapi masing-masing perusahaan. Kementerian BUMN telah melakukan serangkaian transformasi untuk meningkatkan kinerja BUMN, termasuk dengan meningkatkan *core value* bisnis BUMN, membentuk klaster BUMN sejenis (*holding*), dan mengurangi jumlah BUMN dan anak perusahaan yang tidak sehat. Transformasi ini telah mengurangi jumlah BUMN dari 142 menjadi 41 dan menurunkan biaya operasional, termasuk pengurangan jumlah direksi dan komisaris serta peningkatan sinergi antar BUMN. Tetapi, sejumlah masalah masih dihadapi BUMN, sehingga kinerjanya belum optimal dan mempengaruhi kondisi kesehatan perusahaan.

Kesehatan BUMN sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta dukungan terhadap anggaran negara. Dengan memastikan BUMN beroperasi dengan baik, pemerintah dapat mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai yang telah dijelaskan pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN.

Salah satu BUMN yang memegang peran penting di Indonesia adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai penyedia utama infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, jaringan serat optik yang dimiliki Telkom mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil, sehingga memungkinkan adanya akses komunikasi yang luas dan mendukung konektivitas di seluruh negeri. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. berperan penting dalam transformasi digital di Indonesia dengan menyediakan layanan internet dan data yang andal, mendukung perkembangan ekonomi digital, *e-commerce*, pendidikan *online*, dan layanan pemerintah berbasis digital. Hal tersebut sangat penting untuk modernisasi ekonomi dan peningkatan daya saing global. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. juga berperan dalam ekspansi bisnis internasional, membawa brand Indonesia ke panggung global, sehingga tidak hanya meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional tetapi juga membuka peluang investasi dan kerja sama internasional yang lebih luas.

Meskipun PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. telah mencapai berbagai prestasi dan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan infrastruktur negara, perusahaan ini juga menghadapi sejumlah kesulitan. Seperti industri telekomunikasi di Indonesia yang sangat kompetitif, dengan sejumlah pemain besar yang bersaing dalam menawarkan layanan terbaik. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. harus bersaing dengan operator lain seperti Indosat, XL Axiata, dan berbagai penyedia layanan internet yang terus berinovasi dan menawarkan tarif yang kompetitif. Selain itu, perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi sangat cepat. Telkom harus terus berinvestasi dalam teknologi baru, seperti 5G, *cloud computing*, dan IoT, untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengikuti perkembangan teknologi ini memerlukan investasi besar dan kemampuan adaptasi yang cepat.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. berperan penting dalam mendukung perekonomian digital Indonesia, termasuk *e-commerce*, *fintech*, dan *startup* teknologi. Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas infrastruktur telekomunikasi nasional yang penting untuk komunikasi, bisnis, dan berbagai layanan digital. Oleh karena itu, Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. secara langsung memiliki dampak pada ekosistem digital negara. Kondisi tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui Tingkat Kesehatan maupun trend Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2019-2023. Penelitian ini akan menganalisis tentang Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selama periode 2019-2023 berdasarkan aspek keuangan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting bagi investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai risiko dan potensi investasi pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Definisi BUMN berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha dimana baik seluruh maupun sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan secara langsung. Pendirian BUMN ditujukan untuk menghasilkan dan menyediakan barang maupun jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. BUMN juga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan untuk memperkuat negara serta berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional.

BUMN diklasifikasikan menjadi dua yakni, BUMN non infrastruktur dan BUMN infrastuktur. BUMN non infrastruktur adalah perusahaan milik negara yang beroperasi di sektor-sektor lain yang tidak terkait langsung dengan pembangunan fisik infrastruktur seperti sektor keuangan, telekomunikasi, pertanian, farmasi dan sebagainya. BUMN infrastruktur merupakan perusahaan milik negara yang fokus pada pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang penting untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti BUMN pada sektor konstruksi dan infrastruktur, transportasi dan logistik, serta energi dan pertambangan.

2. Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan terstruktur tentang kinerja operasional, posisi keuangan, serta arus kas suatu entitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan, seperti pemilik, manajemen, kreditor, investor potensial, dan pihak-pihak lainnya di luar entitas tersebut, untuk pengambilan keputusan ekonomi.

3. Analisis Laporan Keuangan

Definisi Analisis laporan keuangan menurut (Kasmir, 2018) adalah suatu proses evaluasi mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas, dengan tujuan untuk memahami kinerja keuangan, stabilitas, dan potensi pertumbuhan perusahaan. Analisis ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk mengevaluasi data keuangan yang tercatat dalam neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, serta catatan-catatan tambahan.

4. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, disebutkan bahwa Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN kecuali BUMN yang dibentuk dengan adanya Undang-Undang tersendiri dan Persero Terbuka. Dalam menilai tingkat kesehatan BUMN hanya dilakukan jika hasil audit akuntan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Wajar Tanpa Pengecualian” dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan maupun akuntan publik. Penilaian ini didasarkan pada kinerja perusahaan dalam aspek keuangan, administrasi, dan operasional pada tahun buku yang bersangkutan. Hasil dari penilaian tersebut ditetapkan dalam pengesahan laporan tahunan di setiap tahunnya oleh Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM) atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi:

Tabel 1. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

PREDIKAT	KATEGORI	KETENTUAN
SEHAT	AAA	TS > 95
	AA	80 < TS ≤ 95
	A	65 < TR ≤ 80
KURANG SEHAT	BBB	50 < TS ≤ 65
	BB	40 < TS ≤ 50
	B	30 < TS ≤ 40
TIDAK SEHAT	CCC	20 < TS ≤ 30
	CC	10 < TS ≤ 20
	C	TS ≤ 10

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

5. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan aspek keuangan

Terdapat bobot untuk penilaian pada berbagai indikator dalam aspek keuangan sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Rincian bobot penilaian terdapat table berikut:

Tabel 2. Daftar Indikator dan Aspek Keuangan

NO	PREDIKAT	BOBOT	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2	Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3	Rasio Kas	3	5
4	Rasio Lancar	4	5
5	Collection Periods	4	5
6	Perputaran Persediaan	4	5
7	Perputaran Total Aset	4	5
8	Rasio modal sendiri terhadap aktiva	6	10

Total Bobot	50	70
-------------	----	----

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh melalui dokumentasi dari website, buku, dan jurnal yang relevan dengan masalah penelitian. Data penelitian yang digunakan adalah Laporan Keuangan Audited PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk tahun 2019-2023, yang diperoleh melalui website resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. dan website Bursa Efek Indonesia. Pada website resmi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., data Laporan Keuangan Audited PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. diperoleh pada bagian "Hubungan Investor", kemudian dipilih data pada tahun 2019, 2020, dan 2022. Pada website Bursa Efek Indonesia, data Laporan Keuangan Audited PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. diperoleh dengan cara menggunakan fitur pencarian berdasarkan kode saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yaitu TLKM dan filter tahun 2022 dan 2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002, Variabel yang akan diukur adalah imbalan kepada pemegang saham (ROE), imbalan investasi (ROI), rasio kas, rasio lancar, perputaran persediaan, *collection periods*, perputaran total aset, dan rasio modal sendiri terhadap total aktiva dengan ketentuan berikut:

- a. Imbalan kepada pemegang saham atau *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio keuangan yang digunakan dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang sahamnya. ROE merupakan alat yang berguna bagi investor untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan daya Tarik investasi dalam perusahaan tersebut. (Kasmir, 2018)

$$\text{Rumus : } ROE = \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan ROE, maka dapat ditetapkan skor ROE sesuai tabel

INDIKATOR	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
15 < ROE	15	20
13 < ROE <= 15	13,5	18
11 < ROE <= 13	12	16
9 < ROE <= 11	10,5	14
7,9 < ROE <= 9	9	12
6,6 < ROE <= 7,9	7,5	10
5,3 < ROE <= 6,6	6	8,5
4 < ROE <= 5,3	5	7
2,5 < ROE <= 4	4	5,5
1 < ROE <= 2,5	3	4
0 < ROE <= 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

berikut:

Tabel 3. Daftar Skor Penilaian ROE
Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- b. Imbalan investasi atau *Return on Investment* (ROI) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal yang di investasikan untuk menghasilkan laba operasi. ROI merupakan indikator kunci dari kinerja keuangan yang sehat. (Darmawan, 2020)

$$\text{Rumus : } ROI = \frac{EBIT + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan ROI, maka dapat ditetapkan skor ROI sesuai tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Skor Penilaian ROI

INDIKATOR	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
18 < ROI	10	15
15 < ROI <= 18	9	13,5
13 < ROI <= 15	8	12
12 < ROI <= 13	7	10,5
10,5 < ROI <= 12	6	9
9 < ROI <= 10,5	5	7,5
7 < ROI <= 9	4	6
5 < ROI <= 7	3,5	5
3 < ROI <= 5	3	4
1 < ROE <= 3	2,5	3
0 < ROE <= 1	2	2
ROE < 0	0	1

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- c. Rasio Kas atau *Cash Ratio* merupakan rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset likuid yang paling tinggi, yaitu kas dan setara kas. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan dapat membayar hutang jangka pendek tanpa harus menjual inventaris atau aset lainnya. (Ross, Westerfield, Jaffe, 2019)

$$\text{Rumus : } \text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan *Cash Ratio*, maka dapat ditetapkan skor *Cash Ratio* sesuai tabel berikut:

Tabel 5. Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

Cash Ratio = x (%)	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
x >= 35	3	5
25 <= x < 35	2,5	4
15 <= x < 25	2	3
10 <= x < 15	1,5	2
5 <= x < 10	1	1
0 <= x < 5	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- d. Rasio Lancar atau *Current Ratio* merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang dapat dicairkan dalam jangka waktu yang singkat. (Darmawan, 2020)

$$\text{Rumus : } \text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan *Current Ratio*, maka dapat ditetapkan skor *Current Ratio* sesuai tabel berikut:

Tabel 6. Daftar Skor Penilaian Current Ratio

Current Ratio = x (%)	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
125 ≤ x	3	5
110 ≤ x < 125	2,5	4
100 ≤ x < 110	2	3
95 ≤ x < 100	1,5	2
90 ≤ x < 95	1	1
x < 90	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- e. Collection Periods (CP) adalah periode waktu yang merupakan rata-rata lamanya piutang pelanggan sebelum dibayar, yang dapat memberikan indikasi tentang efisiensi perusahaan dalam mengumpulkan dana. (Eugene, 2021)

$$\text{Rumus : } \textit{Collection Periods} = \frac{\textit{Total Piutang Usaha}}{\textit{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan *Collection Periods*, maka dapat ditetapkan skor *Collection Periods* yang digunakan dapat dipilih dari yang terbaik atas kedua skor berdasarkan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel 7. Daftar Skor Penilaian Collection Periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	SKOR	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
x ≤ 60	x > 35	4	5
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5	4,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3	4
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5	3,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2	3
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6	2,4
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2	1,8
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8	1,2
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x ≤ 1	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- f. Perputaran Persediaan (PP) merupakan rasio keuangan yang mengukur seberapa sering persediaan barang dagangan suatu perusahaan terjual dan diganti dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaannya dan seberapa baik penjualan produk yang dimilikinya. (Sujarweni, 2022)

$$\text{Rumus : } \textit{Perputaran Persediaan} = \frac{\textit{Total Persediaan}}{\textit{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan Perputaran Persediaan, maka dapat ditetapkan skor Perputaran Persediaan yang digunakan dapat dipilih dari yang terbaik atas kedua skor berdasarkan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel 8. Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	SKOR	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
$x \leq 60$	$35 < x$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO) rasio keuangan yang mengukur tingkat efisien suatu perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi Tingkat efisiensi dalam penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. ([Kasmir, 2018](#))

$$\text{Rumus : } TATO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan TATO, maka dapat ditetapkan skor TATO yang digunakan dapat dipilih dari yang terbaik atas kedua skor berdasarkan ketentuan pada tabel berikut:

Tabel 9. Daftar Skor Penilaian TATO

TATO = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	SKOR	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
$120 < x$	$20 < x$	4	5
$105 < x \leq 120$	$15 < x \leq 20$	3,5	4,5
$90 < x \leq 105$	$10 < x \leq 15$	3	4
$75 < x \leq 90$	$5 < x \leq 10$	2,5	3,5
$60 < x \leq 75$	$0 < x \leq 5$	2	3
$40 < x \leq 60$	$x \leq 0$	1,5	2,5
$20 < x \leq 40$	$x < 0$	1	2
$x \leq 20$	$x < 0$	0,5	1,5

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

- h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap TA) merupakan rasio yang mengukur proporsi total modal sendiri yang dibiayai oleh ekuitas pemegang saham yang memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan dan seberapa besar perusahaan bergantung pada pendanaan ekuitas dibandingkan dengan pendanaan utang. ([Eugene F. Brigham, 2021](#))

$$\text{Rumus : } TMS \text{ terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Setelah memperoleh nilai dari perhitungan TMS terhadap TA, maka dapat ditetapkan skor TMS terhadap TA sesuai tabel berikut:

Tabel 10. Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA

INDIKATOR	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5
$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kedelapan indikator dalam menilai Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. untuk periode 2019-2023 pada aspek keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Perhitungan Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Aspek Keuangan

Indikator Aspek Keuangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Hasil	Skor	Hasil	Skor	Hasil	Skor	Hasil	Skor	Hasil	Skor
ROE	23,53%	20	24,45%	20	23,35%	20	18,54%	20	20,57%	20
ROI	27,95%	15	27,69%	15	27,53%	15	25,72%	15	26,18%	15
Cash Ratio	32,20%	4	31,68%	4	56,13%	5	47,30%	5	42,85%	5
Current Ratio	71,48%	0	67,30%	0	88,64%	0	78,22%	0	77,71%	0
CP	33	5	31	5	22	5	4	5	5	5
PP	2	5	3	5	2	5	3	5	2	5
TATO	62,02%	3	55,84%	2,5	52,22%	2,5	54,44%	2,5	53,17%	2,5
TMS	53,00%	8,5	48,95%	8,5	52,46%	8,5	54,24%	8,5	54,54%	8,5
Terhadap TA										
TOTAL SKOR	60,5		60		61		61		61	

Sumber: Data Diolah, 2024

ROE menunjukkan stabilitas tinggi dengan hasil sekitar 19-24%, skor maksimal 20 diperoleh setiap tahun, menandakan kemampuan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk untuk menghasilkan laba yang konsisten dari ekuitas yang dimiliki. ROI tetap stabil pada 26-28%, dengan skor tetap pada 15 setiap di tahun, hal tersebut mengindikasikan efisiensi dalam penggunaan total aset untuk

menghasilkan keuntungan yang konsisten. *Cash Ratio* meningkat dari 32,20% (skor 4) pada tahun 2019 menjadi 47-56% (skor 5) pada 2021-2023, hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perusahaan yang semakin membaik dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. *Current Ratio* tetap di bawah 1 (71-89%) dengan skor 0 setiap tahun yang mencerminkan bahwa perusahaan memiliki tantangan likuiditas, dimana aset lancar kurang memadai untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Waktu pengumpulan piutang (CP) menunjukkan efisiensi yang meningkat dengan skor konsisten 5, dapat dilihat bahwa periode *collection* menurun dari 33 hari (2019) menjadi 4-5 hari (2022-2023). Waktu perputaran persediaan (PP) tetap efisien dengan skor 5 dan periode persediaan berkisar antara 2-3 hari. Efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan penjualan (TATO) menunjukkan stabilitas moderat dengan rasio sekitar 52-62%, skor yang diperoleh bervariasi antara 2,5 hingga 3. Rasio TMS terhadap TA menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan modal sendiri secara efisien untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi, sesuai dengan skor yang diperoleh stabil 8,5 dan hasil sekitar 49-55%.

Total skor yang telah diperoleh tersebut kemudian dikalikan 100 dan dibagi dengan bobot PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. sebagai BUMN non infrastruktur yaitu 70. Berikut merupakan hasil akhir penilaian tingkat kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada periode 2019-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 pada aspek keuangan:

Tabel 12. Penilaian Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Aspek Keuangan Tahun 2019-2024

Tahun	Total Skor	Nilai	Kategori	Predikat
2019	86,43	80 < TS <= 95	AA	SEHAT
2020	85,71	80 < TS <= 95	AA	SEHAT
2021	87,14	80 < TS <= 95	AA	SEHAT
2022	87,14	80 < TS <= 95	AA	SEHAT
2023	87,14	80 < TS <= 95	AA	SEHAT

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan pada table 11 tersebut menunjukkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2019, memperoleh total skor 86,43 yang masuk dalam kategori AA dengan predikat SEHAT. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2019, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. berada dalam kondisi keuangan yang baik dan stabil. Dalam penilaian tingkat Kesehatan pada tahun 2020, perusahaan memperoleh total skor 85,71, yang masih berada dalam kategori AA dengan predikat SEHAT meskipun ada sedikit penurunan dalam beberapa indikator, kondisi keuangan perusahaan tetap baik. Pada tahun 2021, total skor yang diperoleh meningkat 1,43 poin dari periode sebelumnya, ini menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek keuangan dan memperkuat posisi keuangan perusahaan. Selama periode 2022-2023, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk memperoleh total skor 87,14 dimana total skor tersebut sama dengan periode sebelumnya, dengan kategori AA dan predikat SEHAT. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi dalam beberapa indikator, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk tetap dalam kondisi keuangan yang sehat serta stabil sepanjang periode tersebut. Secara keseluruhan pada periode 2019-2023, trend Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. cenderung meningkat dengan stabil di predikat SEHAT pada kategori AA.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data sesuai ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 menunjukkan kondisi Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. selama tahun 2019-2023 pada aspek keuangannya memperoleh predikat SEHAT dengan kategori AA dengan interval nilai $80 < TS \leq 95$. Trend yang dihasilkan cenderung

menggambarkan peningkatan, namun terjadi sedikit penurunan di tahun 2020 karena adanya penurunan rasio TATO dari 62% menjadi 56%, sehingga skor yang diperoleh menurun 0,5. Kemudian naik kembali di 2021 dan stabil sampai tahun 2023 dengan total skor 87,14.

Gambar dan Tabel

Tabel 1. Ketentuan Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

PREDIKAT	KATEGORI	KETENTUAN
SEHAT	AAA	TS > 95
	AA	80 < TS ≤ 95
	A	65 < TR ≤ 80
KURANG SEHAT	BBB	50 < TS ≤ 65
	BB	40 < TS ≤ 50
	B	30 < TS ≤ 40
TIDAK SEHAT	CCC	20 < TS ≤ 30
	CC	10 < TS ≤ 20
	C	TS ≤ 10

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 2. Daftar Indikator dan Aspek Keuangan

NO	PREDIKAT	BOBOT	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
1	Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2	Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3	Rasio Kas	3	5
4	Rasio Lancar	4	5
5	Collection Periods	4	5
6	Perputaran Persediaan	4	5
7	Perputaran Total Aset	4	5
8	Rasio modal sendiri terhadap aktiva	6	10
	Total Bobot	50	70

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 3. Daftar Skor Penilaian ROE

INDIKATOR	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 4. Daftar Skor Penilaian ROI

INDIKATOR	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 5. Daftar Skor Penilaian Cash Ratio

Cash Ratio = x (%)	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 6. Daftar Skor Penilaian Current Ratio

Current Ratio = x (%)	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
125 ≤ x	3	5
110 ≤ x < 125	2,5	4
100 ≤ x < 110	2	3
95 ≤ x < 100	1,5	2
90 ≤ x < 95	1	1
x < 90	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 7. Daftar Skor Penilaian Collection Periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	SKOR	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
x ≤ 60	x > 35	4	5
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5	4,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3	4

120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5	3,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2	3
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6	2,4
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2	1,8
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8	1,2
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x ≤ 1	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 8. Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	SKOR	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
x ≤ 60	35 < x	4	5
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5	4,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3	4
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5	3,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2	3
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6	2,4
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2	1,8
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8	1,2
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x ≤ 1	0	0

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 9. Daftar Skor Penilaian TATO

TATO = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	SKOR	
		BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
120 < x	20 < x	4	5
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5	4,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3	4
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5	3,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2	3
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5	2,5
20 < x ≤ 40	x < 0	1	2
x ≤ 20	x < 0	0,5	1,5

Sumber: Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002

Tabel 10. Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA

INDIKATOR	SKOR	
	BUMN INFRASTRUKTUR	BUMN NON INFRASTRUKTUR
x < 0	0	0
0 ≤ x < 10	2	4
10 ≤ x < 20	3	6
20 ≤ x < 30	4	7,25
30 ≤ x < 40	6	10

40 ≤ x < 50	5,5	9
50 ≤ x < 60	5	8,5
60 ≤ x < 70	4,5	8
70 ≤ x < 80	4,25	7,5
80 ≤ x < 90	4	7
90 ≤ x < 100	3,5	6,5

Tabel 11. Hasil Perhitungan Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Berdasarkan Aspek Keuangan

Indikator Aspek Keuangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Hasil	Skor	Hasil	Skor	Hasil	Skor	Hasil	Skor	Hasil	Skor
ROE	23,53%	20	24,45%	20	23,35%	20	18,54%	20	20,57%	20
ROI	27,95%	15	27,69%	15	27,53%	15	25,72%	15	26,18%	15
Cash Ratio	32,20%	4	31,68%	4	56,13%	5	47,30%	5	42,85%	5
Current Ratio	71,48%	0	67,30%	0	88,64%	0	78,22%	0	77,71%	0
CP	33	5	31	5	22	5	4	5	5	5
PP	2	5	3	5	2	5	3	5	2	5
TATO	62,02%	3	55,84%	2,5	52,22%	2,5	54,44%	2,5	53,17%	2,5
TMS	53,00%	8,5	48,95%	8,5	52,46%	8,5	54,24%	8,5	54,54%	8,5
Terhadap TA										
TOTAL SKOR	60,5		60		61		61		61	

Sumber: Data Diolah, 2024

Tabel 12. Penilaian Tingkat Kesehatan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Aspek Keuangan Tahun 2019-2024

Tahun	Total Skor	Nilai	Kategori	Predikat
2019	86,43	80 < TS ≤ 95	AA	SEHAT
2020	85,71	80 < TS ≤ 95	AA	SEHAT
2021	87,14	80 < TS ≤ 95	AA	SEHAT
2022	87,14	80 < TS ≤ 95	AA	SEHAT
2023	87,14	80 < TS ≤ 95	AA	SEHAT

Sumber: Data Diolah, 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan. (2020). *Dasar-dasar memahami Rasio dan Laporan Keuangan*. UNY Press.
- Eugene F. Brigham, J. F. H. (2021). *Fundamentals of Financial Management* (16 (ed.)). Cengage Learning.
- Ilham Primantara Aji, Gunarianto, S. B. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan BUMN Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002. *AZZAHRA: Scientific Journal of Social Humanities*, 1(3).

- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Lestari, J. R., Saladin, H., & Arifin, M. A. (2022). *Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN pada PT Waskita Karya yang Terdaftar di BEI*. 213–223.
- Meri Dita Rahayu, Indah Listyani, & Edi Murdiyanto. (2023). Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Aspek Keuangan Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 1(4), 215–227. <https://doi.org/10.59841/glory.v1i4.372>
- Muhamad, A., Sofiani, V., & Suherman, A. (2022). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan BumN Berdasarkan Aspek Keuangan Pada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016 - 2020. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.34308/eqien.v10i2.612>
- Santoso, M. (2017). Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan BumN Bidang Konstruksi Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BumN Nomor: Kep-100/Mbu *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1, 168–174. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4340>
- Stephen A. Ross, Randolph Westerfield, Jeffrey F. Jaffe, B. D. J. (2019). *Corporate Finance* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sujarweni, V. W. (2022). *Analisis Laporan Keuangan Teori, Aplikasi & Hasil Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. <https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=master/file/get&id=132>
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. <https://peraturan.go.id/files/UU0192003.pdf>